



# RENCANA KERJA

( RENJA TAHUN 2024)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN GROBOGAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024, merupakan Tahun KETIGA periode RPJMD 2021-2026 serta sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang disusun setiap tahun serta menjadi acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purwodadi, 14 Maret 2023

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN GROBOGAN



*[Signature]*  
Drs. LEGUH HARJO KUSUMO, R, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720102 199101 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH .....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD .....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	II-11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-12
BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2024.....	III-7
3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024.....	III-9
3.4. Arah Kebijakan Tahun 2024.....	III-19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024.....	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 .....	IV-1
4.2. Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V-1



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan.

Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Kabupaten Grobogan juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan Disnakertrans Kabupaten Grobogan untuk periode 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Disnakertrans Kabupaten Grobogan serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan secara substantive tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementrian Tenaga Kerja, RPJM Kemendes PDT, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kabupaten Grobogan, merupakan tahun ke-3 (ketiga) pelaksanaan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan wujud 'apa' yang akan dikerjakan 'dari' apa yang ingin dicapai' melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan akan menuju Visi dan Misi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik yang dilaksanakan



pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat

Untuk itu prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah mendukung **“Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perekonomian Daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi”** yang akan dicapai melalui :

1. **Penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, dan**
2. **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Responsif, Profesional dan Modern”**

Prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang Kondusif dan berkeadilan demi Kesejahteraan Pekerja.
3. Meningkatnya Penempatan Transmigrans.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public di dukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum Penyusunan Renja Disnakertran Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. **Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolak ukur penilaian Renja Disnakertrans dan sesuai tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan;

- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan;

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP);
- 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 5. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.
- 6. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;
- 8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan ;
- 9. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **I. PENDAHULUAN.**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat

### III. TUJUAN, SASARAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2024.

3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024.

3.4. Arah Kebijakan Tahun 2024.

### IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024.

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024.

4.2. Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024.

### V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 akan dipaparkan dalam uraian dan analisis capaian kinerja, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada Tahun 2022 mendapatkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.639.909.442,00 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 10.997.620.242,00 dan belanja modal sebesar Rp. 642.289.200,00 yang didukung oleh 6 program dan 13 kegiatan serta 26 sub kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 2.1  
Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	99.234.000,00	99.234.000,00	0,00
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	587.288.859,00	1.337.288.859,00	750.000.000,00
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.660.175.850,00	3.920.093.850,00	259.918.000,00
4	Program Hubungan Industrial	275.767.800,00	296.467.800,00	20.700.000,00
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	179.970.000,00	157.909.900,00	-22.060.100,00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.753.430.791,00	5.828.915.033,00	75.504.242,00
Jumlah		10.555.847.300,00	11.639.909.442,00	1.084.062.142,00

Realisasi anggaran atau serapan dana APBD mencapai 11.343.466.335,00 (97,45%), dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 sebesar Rp. 296.443.107,00,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, namun realisasi capaian fisik tetap tercapai.

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 97,45% persen dari total anggaran yang dialokasikan.



Realisasi anggaran untuk program / kegiatan utama sebesar 98,05 persen sedangkan program kegiatan pilihan sebesar 96,61 persen dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,11 persen.

Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Efektifitas Anggaran Belanja**

NO	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KRITERIA
A.	Mensururkan Tingkat Pengangguran	5.810.994.409,00	5.695.655.281,00	84,07%	Cukup Efektif
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	99.234.000,00	99.234.000,00	100,00%	efektif
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.337.288.859,00	1.310.987.859,00	98,03%	efektif
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.920.093.850,00	3.836.663.222,00	97,87%	efektif
4	Program Hubungan Industrial	296.467.800,00	296.220.300,00	99,92%	efektif
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	157.909.900,00	152.549.900,00	96,61%	efektif
B.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	5.828.915.033,00	5.647.811.054,00	96,89%	efektif
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.828.915.033,00	5.647.811.054,00	96,89%	efektif
	JUMLAH	11.639.909.442,00	11.343.466.335,00	97,45%	Cukup Efektif

Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasara Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Anggaran Tahun 2022			Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.810.994,409	5.695.655,281	98,02	4,4	4,4	100
Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	1.436.522,859	1.410.221,859	98,17	75,75	77,21	101,93
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3.920.093,850	3.836.663,222	97,87	49	100	204,08
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	296.467,800	296.220,300	99,92	18,99	20	105,32
Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	157.909,900	152.549,900	96,61	100	100	100
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	32.844,000	32.349,000	98,49	B (65)	BB (73,43)	112,97
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5.796.071,033	5.615.462,054	96,88	B (82,70)	B (88,98)	108
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	32.844,000	32.349,000	98,49	B (65)	BB (73,43)	112,97
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5.796.071,033	5.615.462,054	96,88	B (82,70)	B (88,98)	108
Jumlah		11.639.909,442	11.343.466,335	97,45			





Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan" tahun ini sebesar 77,21 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 sebesar 76,25 %, maka capaian kinerjanya sebesar 101,26 %.

Tabel 2.5

**Analisis Capaian Kinerja Nyata Sasaran I Indikator ke- 1  
Dibandingkan dengan target Akhir Renstra 2021-2026**

NO.	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	Renstra 2021-2026			Renja 2022		
				TARGET AKHIR	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kesempatan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja	1. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Penerima Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri dan Luar Negeri}}{\text{Jumlah Penerima Kerja yang terdaftar}} \times 100$	76,25%	77,21%	101,26%	76,25%	77,21%	101,26%
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga kerja mendapat pelatihan}} \times 100$	46,75%	100%	204,08%	46%	100%	204,08%

Capaian indikator kinerja nyata Indikator Sasaran 1 sudah melebihi target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu ditingkatkan antara lain :

- Memaksimalkan media social sebagai sarana Informasi Pasar Kerja Online.
- Mendorong perluasan kesempatan kerja bagi pengusaha yang bergerak di sector informal.
- Meningkatkan program padat karya dan peningkatan produktifitas usaha kecil dan mikro.

Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja indikator kinerja 1 sasaran I, adalah sebesar Rp 1.310.987.859,- atau sebesar 98,03 % dari total pagu sebesar Rp 1.337.288.859,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar 1,97 % dari pagu yang ditentukan.



**Tabel 2.6**  
**Realisasi Sumber Daya Keuangan Sasaran I, Indikator Ke-1**

PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	75,5	1.337.288,89	77,21	1.310.807,89	26.391,00	102,26%	98,00%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri	49	998.470,00	51,07	942.994,90	7.965,50	75,90%	96,16%
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kabupaten / Kota	11.750	180.255,00	11.820	156.157,50	4.187,50	100,00%	97,44%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus / Jumlah siswa yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80	40.205,00	80	40.305,00	-	100,00%	100,00%
Perluasan Receptable Kerja	Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Ketrans	750	750.000,00	750	749.942,00	2.058,00	100,00%	99,99%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media penyebaran informasi Pasar Kerja yang terkelola	2	286.638,99	2	250.403,49	16.575,50	100,00%	94,75%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi IPK yang terpelihara	1	114.778,99	1	112.351,49	2.227,50	100,00%	98,69%
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Job Fair dan Bursa Kerja yang terlaksana	1	151.895,00	1	137.512,00	14.343,00	100,00%	94,55%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon PMI dan Eks PMI yang ribina	40	128.179,80	25,34	198.419,89	1.768,00	61,35%	98,54%
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi	350	80.179,80	350	80.179,80	-	100,00%	100,00%
Pembendayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia/TNI Purna dan Keluarga yang diberdayakan	40	40.000,00	40	38.340,00	1.760,00	100,00%	95,00%

## 2) **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

Capaian indikator ini sebesar 100% lebih tinggi dari target sebesar 49 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 204,08 %. *Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi* dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di kali 100 ( seratus ). Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi sebanyak 375 orang dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebanyak 375 orang, sehingga diperoleh Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi sebesar 100 %



Capaian yang cukup memuaskan karena bisa melebihi target yang diperjanjikan.

Tabel 2.7

Data Calon PMI yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi *					
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan					
Tahun 2022					
Identitas Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia					
No	Nama Peserta	Jenis Kelamin		Alamat	No/BBN
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	LULUK KHORUL		1	Dusun Sandung RT 001 RW 004 Desa Dorolegi, Godong, Grobogan	560. 51/900. 1
2	SITI RUKMANA		1	Dusun Tegowanu RT. 15 RW 04, Desa Tegowanuwetan, Tegowanu, Grobogan	560. 51/900. 2
3	SUMIYATI		1	Dusun Kepoh RT 02 RT 04, Desa Katangiryo, Godong, Grobogan	560. 51/900. 3
4	DIYAH ANSATOR RODIAH		1	Dusun Anggaewangi RT 01 RW 01, Desa Anggaewangi, Godong, Grobogan	560. 51/900. 4
5	OLA SIFIANA		1	Dusun Sandung RT 004 RW 004 Desa Dorolegi, Godong, Grobogan	560. 51/900. 5
6	RETNO ASIH		1	Desa Lejok RT 02 RW 03 Desa Mojoagung, Karangrayung, Grobogan	560. 51/900. 6
7	WELAS ASIH		1	Desa Dorolegi RT 07 RW 03 Kec. Godong Kab. Grobogan	560. 51/900. 7
8	INDAH AYU SAFITRI		1	Dusun Sandung RT 004 RW 004 Desa Dorolegi Kec. Godong Kab. Grobogan	560. 51/900. 8
9	MUKAYATI		1	Desa Rajek RT 03 RT 01 Kec. Godong Kab. Grobogan	560. 51/900. 9
10	SUSIYANTI		1	Dusun Sandung RT 05 RW 04, Desa Dorolegi Kec. Godong Kab. Grobogan	560. 51/900. 10
370	TRI OKTOMI		1	Tajemlari RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 370
371	AKHIRTA DESTI		1	Dusun Kleben RT. 04 RW. 04 Plosoharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 371
372	SRI MUNINGSIH		1	Dusun Karangsan RT. 01 RW. 02 Karangsan Kecamatan Irti Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 372
373	PKATUN		1	Dusun Tegal Tr. 05 RW. 01 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 373
374	EKA SEPTILASARI		1	Kunjeng RT. 03 RW. 02 Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 374
375	KHOIRUL IMAYAH		1	Dusun Rajek RT. 02 RW. 01 Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan	560. 51/900. 375
Jumlah		0	375		375

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , capaian kinerja Sasaran I, indikator ke-2 " Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Tenaga dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 sebesar 49,75% maka capaian kerjanya mencapai 201,01 %.

Capaian indikator kinerja nyata ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu ditingkatkan antara lain :

- Mendorong pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan ketrampilan serta mengikuti uji kompetensi yang selenggarakan oleh Lembaga yang di tunjuk.

- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana subsidi biaya uji kompetensi bagi pencari kerja.

Tabel 2.8

Analisis Capaian Kinerja Nyata Sasaran I, Indikator ke-2  
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	Renstra 2021-2026			Renja 2022		
				TARGET AKHIR	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penyerapan tenaga kerja	1. Persentase tenaga kerja yang terserap	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Kerja yang terserap dalam Negeri dan Luar Negeri}}{\text{Jumlah Penerimaan Kerja yang terdistribusi}} \times 100$	75,25%	77,21%	101,28%	75,75%	77,21%	102,40%
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga kerja mendapatkan pelatihan}} \times 100$	48,75%	100%	201,04%	48%	100%	204,08%

Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran I indikator 2, adalah sebesar Rp 3.836.663.222,- atau sebesar 97,87 % dari total pagu sebesar Rp 3.920.093.850,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar 2,13 %.

Tabel 2.9

Realisasi Sumber Daya Keuangan Sasaran I Indikator ke-2

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	3.920.093.850	100	3.836.663.222	97,87%	97,87%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sejumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ( PMDN 86/2017 )	8	3.818.052.680	100	3.735.271.917	97,89%	97,89%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerima Kerja berdasarkan Kaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	501	3.618.852.000	501	3.735.271.917	103,02%	103,02%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang tersertifikasi ( PMDN 86/2017 )	75	101.441.250	0	101.441.250	-	0,00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan	80	101.441.250	80	101.441.250	-	100,00%

- b. Capaian kinerja sasaran 2 : **Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan demi Kesejahteraan Tenaga Kerja** dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Sasaran **Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak**.

Indikator ini merupakan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kinerja II. Capaian Indikator ini sebesar 20,00%, lebih tinggi dari target sebesar 18,99% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,32 %, capaian ini melebihi target yang



Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan di Kabupaten Grobogan di kali 100. Pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 46 perusahaan; sedangkan perusahaan yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 230 perusahaan sehingga capaian kinerjanya sebesar 20,00% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.10

DATA PERUSAHAAN PP/PKB KABUPATEN GROBOGAN		
No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	PT FORMOSA BAG INDONESIA (PKB)	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km 26.5, Kec. Tegowanu
2	PT HOLI KARYA SAKTI (PKB)	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km 28 Kec. Tegowanu
3	RS PANTI RAHAYU YAKKUM (PKB)	Jl. R. Suprpto No. 6, Purwodadi
4	BENGAWAN RETAIL MANDIRI (PKB)	Jl. R. Suprpto No 928, Purwodadi
5	SPBU 44.581.06 GETASREJO	Desa Getasrejo, Purwodadi
6	BPR WIROSARI IJO	Jl. Kusuma Bangsa No.25, Kec. Wirosari
7	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, Godong	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km 40, Kec. Godong
8	PT PUNGKOOK INDONESIA ONE	Jl. Raya Purwodadi Blora Km 38, Kec. Wirosari
9	PT CITRA NIAGA KARYA LESTARI	Jl. Raya Purwodadi Blora Km 8, Kec. Wirosari
10	PT MALINDO FEEDMILL TBK	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km 40, Kec. Godong
33	Bank Jateng Cabang Purwodadi	Jl. S. Parman No. 16, Purwodadi
34	Bank Mandiri Cabang Purwodadi	Jl. R. Suprpto No. 97 AB, Purwodadi
35	Bank Woori Saudara Purwodadi	Jl. S. Parman No. 23, Purwodadi
36	Bank Syariah Indonesia Purwodadi	Jl. R. Suprpto No. 90, Purwodadi
37	Perum Perhutani KPH Purwodadi	Jl. Gatot Subroto No. 1, Purwodadi
38	BCA KCU Purwodadi	Jl. MT Haryono No. 2, Purwodadi
39	PT. Cargill Indonesia (Purwodadi)	Jl. Raya Semarang - Purwodadi, Desa Ketilang, Godong
40	PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwodadi	Jl. A. Yani No. 974, Purwodadi
41	PT Long Ice Success Indonesia	Jl. Raya Purwodadi - Blora Km 2 Rejosari Grobogan
42	CV Usaha Boga Sukses Makmur	Dusun Plosonembungan RT 01 RW 03, Grobogan
43	Hotel 21 / CV Megah Raya	Jl. MT Haryono No.137 Purwodadi
44	Hotel Kencana	Jl. S. Parman, Komplek Ruko S. Parman, Purwodadi
45	KSP KUD Mitorogo	Jl. Gajah Mada, Ruko Gajah Mada, Purwodadi
46	SPBU Pertamina 44.581.03 Nglejok	Jl. Semarang Purwodadi Kertan

DATA PERUSAHAAN DI KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2022

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Kategori Besar/Sedang/Kecil	Total Tenaga Kerja
1	PT Pungkok Indonesia One	Jl. RAYA PURWODADI-BLORA KM. 18 RT 001 RW 002 KEL. TANJUNGREJO KEC. WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN JAWA TENGAH	Besar	12.420
3	PT Formosa Bag Indonesia	Jl. Raya Semarang Purwodadi Km 26.5	Besar	5.457
4	PT Sai Apparel Industries	Jl Semarang Purwodadi Desa Harjowirangun, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58162	Besar	2.115
5	PT Heli Karya Sakti	JALAN RAYA SEMARANG PURWODADI KM 28 TEGOWANU GROBOGAN	Besar	1.622
6	Bri Purwodadi	Jl. KS Tahan No 1 Purwodadi Grobogan	Besar	752
7	RS Perusa Bunda Purwodadi	Jl. Hayam Wirni no. 24 Purwodadi Grobogan	Besar	459
8	Rimah Sakti Panti Waluyo "yakkum" Purwodadi Grobogan	Jalan R. Suprpto No. 6, Kertadina Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Besar	399
9	PT Belgrade Raya	Jl. SEMARANG - PURWODADI KM 27 DEN DAPLANG DS MANGUNSAH KEC TEGOWANU KAB GROBOGAN	Besar	358
10	PT BPR BEK PURWODADI (PERSEROAN)	Jl. SISWIMBARJO NO.008 40 PURWODADI	Besar	322
221	Kelompok Tani Karya Tani Ii Purwodadi Grobogan	Jl. Kaptan Rusdyat E No. 47, Durgang Purwodadi	Mikro	-
223	Rafidin Satrio Perada	DUSUN KERNEKAN RT. 02 RW. 06, Buntuharjo, Teroh	Mikro	-
224	Istana Kasih Karmi	Jl. Diponegoro No. 121 RT. 03 RW. 03, Purwodadi	Mikro	-
225	Hutawa Karya Gunung	Jalan Raya Pak-Tayu KM 05, Grobogan	Mikro	-
226	Panca Karya Mei	KRAJAN, Bubo, Tawangharjo	Mikro	-
227	Milia Jati Nabel	Dusun Mojo RT. 03 RW. 04, Cakil, Karangayu	Mikro	-
228	Rahma Prita Permana Jaya	Besosa III No. 08, Purwodadi	Mikro	-
229	Sakti Gunung	Grogono RT. 03 RW. 01, Anggotanagi, Godong	Mikro	-
230	Toptea Alhamdulillah Mly	Grogok, Banjarowo, Kradenan	Mikro	-



Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu mendorong perusahaan yang ada di Kabupaten Grobogan untuk memenuhi aspek-aspek Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Capaian sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Workshop penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama serta pelaksanaan peringatan hari buruh (MayDay). Peningkatan kapasitas dan fungsi Dewan Pengupahan mampu menekan perselisihan hubungan industrial.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebesar 27,43% maka Indikator ke 3 " Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak" pada tahun 2022, capaian kinerjanya mencapai 72,91%.

**Tabel 2.11**

**Analisis Capaian Kinerja Nyata Sasaran II, Indikator ke-3  
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2021-2026**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	Renstra 2021-2026			Renja 2022		
				TARGET AKHIR	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya kondisi hubungan industri yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan tata lida kerja yang layak	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata lida kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan di Kabupaten Grobogan}} \times 100$	27,43%	20,0%	72,91%	16,66%	20,0%	118,22%

Capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan, mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA 2021-2026 sehingga masih banyak program dan kegiatan yang harus ditingkatkan antara lain :

- Pelaksanaan workshop penyusunan peraturan perusahaan bagi pengusaha agar memahami proses dan alur pembuatan peraturan perusahaan.
- Memaksimalkan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial.

Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja indicator ke-3 sasaran II, adalah sebesar Rp 296.220.300,- atau sebesar 99,92% dari total pagu sebesar Rp 296.467.800,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar Rp 247.500,- atau sebesar 0,08 % dari pagu yang ditentukan.

Tabel 2.12

### Realisasi Sumber Daya Keuangan Sasaran II Indikator ke-3

Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)		Target dan Realisasi per Triwulan						
		Triwulan IV				SLPA		
		Target		Realisasi				
Pernyataan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PPS	18,98	296.467.800	20,00	296.220.300	247.500	100,32%	99,92%
Pengesehan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PPS	18,98	45.810.000	20,00	45.810.000	-	100,32%	100,00%
Pengesehan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan ( PP ) ( PMDN 18/2017 )	930	45.810.000	930	45.810.000	-	100,30%	100,00%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa pengusaha yang terselesaikan (PMDN 18/2017)	100	250.657.800	100	250.410.300	247.500	100,04%	99,94%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Bersifat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diline terkait permasalahan Ketenagakerjaan	190	123.054.500	190	123.530.750	123.750	100,30%	99,90%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1	127.003.300	1	126.679.550	123.750	100,03%	99,90%

- c. Capaian kinerja sasaran 3 : **Meningkatnya Penempatan Transmigrans dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Calon Transmigrans yang diberangkatkan*** ,

Indikator ini merupakan satu-satunya indicator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kinerja III. Capaian Indikator ini sebesar 100,00%, sesuai dengan target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Persentase calon transmigran yang diberangkatkan dihitung berdasarkan jumlah calon transmigrans yang diberangkatkan di bagi jumlah kuota yang disediakan pada tahun 2022 di kali 100 ( seratus ).

Berdasarkan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475-1/8463 tanggal 8 Desember 2022



perihal Perubahan alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrans Jawa Tengah Tahun 2022.

Disnakertrans Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Penempatan Transmigrans ke wilayah sebagai berikut :

1. Kawasan Kahingai Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sebanyak 8 KK.
2. Kawasan Motihelumo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebanyak 1 KK.
3. Kawasan SP 10 Tanjung Buka, Kalimantan Utara sebanyak 2 KK.

Tabel 2.13

DATA PENEMPATAN TRANSMIGRASI ASAL KABUPATEN GROBOGAN

NO	TAHUN	DAERAH PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
1	2018	1. UPT. Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	7	28	
		2. UPT. Tanjung Setai SP.3 Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	6	37	
2	2019	1. UPT. Tanjung Buka SP. 68 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	16	70	
		2. UPT. Kahingai Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	9	37	
3	2020				Nihil karena pandemi covid 19
4	2021				Nihil karena pandemi covid 19
5	2022	1. UPT. Motihelumo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	1	4	
		2. UPT. Tanjung Buka SP 10 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	2	5	
		3. UPT. Kahingai Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	8	29	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan selalu berhasil memenuhi kuota pemberangkatan dan penempatan calon Transmigrans sesuai dengan kuota yang di berikan. Keberhasilan ini menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Grobogan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui Program Transmigrasi.

Kegiatan penyuluhan Transmigrasi yang di laksanakan di Desa-Desa mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi Calon Transmigrans, selain itu kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Lokasi Penempatan juga senantiasa di jalin dengan baik melalui kegiatan Monitoring, Penjajagan dan



Selanjutnya bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebesar 100% maka capaian kinerja sasaran III Indikator ke 4 " Persentase calon transmigran yang diberangkatkan" pada tahun 2022, capaian kinerjanya mencapai 100%.

Capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan, mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA 2021-2026 sehingga masih banyak program dan kegiatan yang harus ditingkatkan antara lain tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi penempatan Transmigrasi, belum di laksanakan karena keterbatasan anggaran.

Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran III indicator ke-4, adalah sebesar Rp 152.549.900,- atau sebesar 96,61% dari total pagu sebesar Rp 157.909.900,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar Rp 5.360.000,- atau sebesar 3,39 % dari pagu yang ditentukan. Efisiensi ini diperoleh dari selisih harga tiket pesawat dan sewa kendaraan air.

Tabel 2.14

## Realisasi Sumber Daya Keuangan Sasaran III Indikator ke-4

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target dan Realisasi per Triwulan							
		Triwulan V							
		Target		Realisasi		SLPA	Persentase Capaian (%)		
Pernyataan	Indikator	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	100	157.909.900	100	152.549.900	5.360.000	100,00%	95,61%	
Penataan Penyebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	100	157.909.900	100	152.549.900	5.360.000	100,00%	95,61%	
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	10	41.709.900	11	37.709.900	4.000.000	110,00%	95,41%	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Masyarakat yang mengikuti penyuluhan transmigrasi	180	80.000.000	180	80.000.000	-	100,00%	100,00%	
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	20	58.200.000	20	54.840.000	1.360.000	100,00%	97,58%	

- d. Capaian kinerja sasaran 4 : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi*** dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Sasaran OPD meliputi :

**1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah,**

Indikator ini merupakan perhitungan nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.

Capaian indicator ini sebesar 73,43 point dengan predikat SANGAT BAIK. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten grobogan, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Evaluasi Perencanaan Strategis.**

Evaluasi strategis meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Renstra, kualitas renstra dan implementasi renstra. Score yang di dapat 8,00 point..

**b. Evaluasi Perencanaan Kinerja Tahunan.**

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja tahunan meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Evaluasi Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Implementasi perencanaan Kinerja Tahunan. Nilai yang didapat sebesar 15,60 point.

**c. Evaluasi Pengukuran Kinerja.**

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pengukuran, dan Implementasi Pengukuran Kinerja. Nilai yang didapat sebesar 20,94 point.

**d. Evaluasi Pelaporan Kinerja.**

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan Pelaporan Kinerja, Evaluasi Penyajian Informasi Evaluasi terhadap Evaluasi Internal.

Pada Evaluasi Internal terdapat komponen yang dievaluasi yaitu Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, dan Pemanfaatan Evaluasi. Nilai yang didapat sebesar 6,20 point.

**e. Evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.**

Pada evaluasi ini mendapatkan nilai sebesar 14,30 Point yang terdiri dari



Capaian kinerja nyata Sasaran IV, Indikator ke-5 sudah sangat memuaskan, namun masih banyak yang perlu di lakukan perbaikan-perbaikan diantaranya :

- Dokumen Renstra agar lebih diselaraskan dengan dokumen RPJMD.
- Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang.
- Laporan kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 2.15

NO.	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Memplaihan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5. Nilai SKRP Penguat Dasar	Perhitungan nilai dari komponen (pencapaian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun internal sesuai Permenn PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AK/P Instansi/Pemerintah	8 (85)	88 (73,43)	112,97%
		6. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor IKM unit pelayanan publik di lingkungan Dinas Ketrans.	8 (82,70)	8 (88,98)	108%

## 2). Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntable, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah menyelenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan public terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 370 orang responden, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,98 dengan predikat SANGAT BAIK.

Dari hasil pengolahan data , dapat diketahui bahwa ;

- Kecepatan Layanan mendapatkan nilai termdah yaitu 3,42. Disusul termdah kedua procedure layanan yaitu 3,43.
- Sedangkan dua unsur dengan nilai tertinggi yaitu sarana dan prasarana mendapatkan Nilai tertinggi 3,82 dan biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,81.
- Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 memerlukan upaya yang maksimal agar dapat mencapai target yang ditetapkan.



**Tabel 2.16**

**BAB III  
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM**

**3.1 Jumlah Responden SKM**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden pemerintah layanan yang diperoleh yaitu 120 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

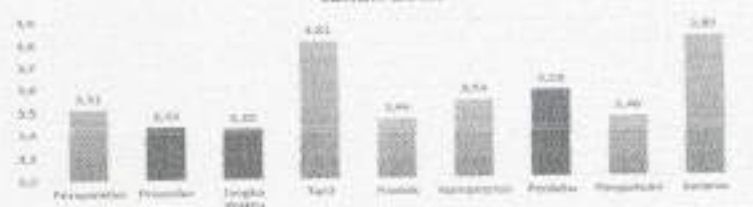
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTAS
			Angka	%
1	JENIS KELAMIN	Laki	66	55,0%
		Perempuan	54	45,0%
2	PENDIDIKAN	SD ke Bawah	17	14,2%
		SMP	120	100,0%
		SMA	171	141,7%
		DIK	44	3,7%
		SI	44	3,7%
		S2	4	3,3%
3	PEKERJAAN	PNS/TNPP/DB	0	0,0%
		SWASTA	20	16,7%
		PELAJARAN/MAHASISWA	100	83,3%
4	JENIS LAYANAN	PELAYANAN BERBASIS KOMPUTER/CI LIPIS BSE	134	111,7%
		PEMBAYARAN AKHIR/PAKET KUNING	120	100,0%
		REKUMENDASI PASPOR	77	64,2%
		LAINNYA	50	41,7%

**Tabel 2.17**
**3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsor Layanan)**

Pengolahan data SKM menggunakan excel template etah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,51	3,43	3,42	3,81	3,46	3,34	3,38	3,45	3,82
Kategori		B	B	B	A	B	B	A	B	A
IKM	Unit	86,98 (A atau Sangat Baik)								
Layanan										

**IKM per Unsur pada DISNAKERTRANS Kabupaten  
Grobogan  
Tahun 2022**



Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran IV indicator ke-5, adalah sebesar Rp 32.349.000,- atau sebesar 98,49% dari total pagu sebesar Rp 32.844.000,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar Rp 495.000,- atau sebesar 1,51 % dari pagu yang ditentukan. Efisiensi ini diperoleh dari selisih anggaran upah jasa tenaga operator computer yang tidak terserap karena jumlah hari kerja yang berkurang karena libur nasional.

Tabel 2.18

Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan Sub Kegiatan		Target dan Realisasi per Tahun						
			Tahun IV						
			Target		Realisasi		SIPA		Pencapaian Capaian (%)
	Pengisian	Indikator	Ketup	Anggaran	Ketup	Anggaran		Ketup	Anggaran
Nilai SIKP Perangkat Daerah			61	32.844.000	71,61	32.349.000	49.000	102,91%	98,49%

Realisasi Sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja sasaran IV indicator ke-6, adalah sebesar Rp 5.615.462.054,- atau sebesar 96,88% dari total pagu sebesar Rp 5.796.071.033,-. Hal ini berarti ada efisiensi sebesar Rp 180.609.979,- atau sebesar 3,11 % dari pagu yang ditentukan.

Tabel 2.19

Indikator Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan Sub Kegiatan		Target dan Realisasi per Tahun						
			Tahun IV						
			Target		Realisasi		SIPA		Pencapaian Capaian (%)
	Pengisian	Indikator	Ketup	Anggaran	Ketup	Anggaran	Ketup	Anggaran	Ketup
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			62,7	5.796.071.033	61,08	5.615.462.054	60.000.000	103,78%	96,88%

Adapun hal-hal yang mendukung atau mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja terangkum dalam tabel berikut :



Indikator Kinerja Sasaran	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
Persetujuan Calon Transmigran yang diberangkatkan	1. Minat masyarakat untuk menjadi calon transmigrans masih cukup tinggi.		Kuda penempatan Transmigrans tidak sebanding dengan jumlah Calon Transmigrans yang akan diberangkatkan.	Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuka kawasan transmigrans lebih banyak lagi.
	2. Sosialisasi dan penyuluhan program transmigrasi tepat sasaran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
	3. Meningkatnya kesejahteraan Transmigran yang telah diberangkatkan mampu mendorong minat calon transmigrans untuk segera di tempatkan			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Disakiptrans melaksanakan tata kelola pemerintahan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun dan telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja	Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Dokumen Renstra agar lebih diselaraskan dengan dokumen Rp JMD.  2. Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan Laporan kinerja juga belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	1. Melakukan evaluasi dan menyusun perubahan RENCANA STRATEGIS agar selaras dengan RPJMD.  2. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dan menyusun LKJP disertai dengan analisa efisiensi penggunaan sumber daya
	Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi digital sehingga persentase kesalahannya dapat di minimisir.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Kecapatan Layanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,42. Disusul terendah kedua procedure layanan yaitu 3,43.	Meningkatkan Kompetensi SDM Pelayanan Ketersinergian melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Tabel 2.20  
Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran	Faktor yang Mempengaruhi Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	1. Penyediaan sarana Pelayanan Publik yang Representatif dan mudah diakses	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat sehingga dapat mendukung kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kerja di Balai latihan kerja dan program penempatan.
	2. Pelaksanaan Job Fair yang menyediakan kesempatan kerja yang luas		Kesempatan Kerja Masih Terbatas	Mendorong Perusahaan untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro sebagai sarana mengetahui kebutuhan tenaga kerja lima tahun ke depan.
	3. Pelaksanaan bebas biaya pelatihan dan uji kompetensi bagi CPML		Kelidaksesuai antara jenis jabatan yang tersedia dengan tingkat pendidikan pencari kerja	
Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi.	3. Publikasi Kesempatan Kerja melalui media sosial yang di kelola Disnakertrans.		Rendahnya gaji dan upah	
	Pembebasan biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi bagi Calon Pekerja Migrants Indonesia.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingginya biaya uji kompetensi yang harus di bayar oleh Tenaga Kerja.	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana subsidi biaya uji kompetensi bagi pencari kerja.
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.	1. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2. Pelaksanaan Kegiatan Mayday sebagai bentuk penghargaan atas jasa para buruh dan pekerja. 3. Memaksimalkan fungsi lembaga kerja sama tripartite maupun lembaga kerja sama bipartite	Program Hubungan Industrial	Masih rendahnya Upah Minimum Kabupaten menjadi permasalahan yang sulit untuk di can solusinya.	



## B. Capaian Kinerja Tujuan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan instansi pemerintah.

Keberhasilan Kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut :

### a. Capaian Kinerja Tujuan I : Menurunkan Tingkat Pengangguran

**Tingkat Pengangguran Terbuka** merupakan indicator tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, pada tahun 2022 sebesar 4,40% . Hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Grobogan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,10 % dibanding tahun awal Renstra 2021-2026 yakni sebesar 4,50%.

**Tingkat Pengangguran terbuka** dihitung berdasarkan jumlah pengangguran terbuka dibagi jumlah angkatan kerja di kali 100 ( seratus ).

Tabel 2.21

Karakteristik	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pendidikan tertinggi yang diamatkan			
<=SD	2.894	14.440	17.434
SLTP	3.276	2.818	6.091
SLTA Umum	4.120	403	4.523
SLTA Kejuruan	3.115	1.409	4.524
Diploma III/IV/ Akademi	-	-	-
Universitas (DIV/S1/S2/S3)	1.733	-	1.733
<b>Total</b>	<b>16.237</b>	<b>19.068</b>	<b>34.305</b>
Kelompok Umur			
15-19 tahun	2.088	2.497	4.585
20-24 tahun	6.768	649	6.417
25-29 tahun	3.990	-	3.990
30-34 tahun	485	384	869
35-39 tahun	-	946	946
40-44 tahun	627	759	1.386
45-49 tahun	-	4.032	4.032
50-54 tahun	-	4.512	4.512
55-59 tahun	-	306	306
60-tahun	2.269	4.983	7.282
<b>Total</b>	<b>16.237</b>	<b>19.068</b>	<b>34.305</b>
Klasifikasi			
Pekerjaan	6.911	14.707	21.618
Pendesaan	8.329	4.361	12.690
<b>Total</b>	<b>15.237</b>	<b>19.068</b>	<b>34.305</b>

Tabel 2.22

ANGKATAN KERJA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022				
Karakteristik		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	<=SD	232.577	190.490	423.067
	SLTP	102.983	59.813	162.796
	SLTA Umum	70.365	30.954	101.319
	SLTA Kejuruan	38.359	19.142	57.501
	Diploma IV/II/ Akademi	3.111	3.161	6.272
	Universitas (DMS1/S2/S3)	13.136	15.046	28.182
	<b>Total</b>	<b>460.531</b>	<b>318.606</b>	<b>779.137</b>
Kelompok Umur	15-19 tahun	19.433	12.986	32.419
	20-24 tahun	51.320	28.431	79.751
	25-29 tahun	46.674	22.229	68.903
	30-34 tahun	47.821	32.354	80.175
	35-39 tahun	47.400	33.238	80.638
	40-44 tahun	48.370	36.709	85.079
	45-49 tahun	48.908	39.887	88.795
	50-54 tahun	43.379	33.922	77.301
	55-59 tahun	34.815	24.605	59.420
	60+ tahun	72.411	54.247	126.658
	<b>Total</b>	<b>460.531</b>	<b>318.606</b>	<b>779.137</b>
Klasifikasi	Pertanian	100.051	72.757	172.808
	Perdagangan	360.480	245.849	606.329
	<b>Total</b>	<b>460.531</b>	<b>318.606</b>	<b>779.137</b>

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah Penduduk Usia Kerja yang sedang Menganggur sebanyak 34.305 orang dan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 779.137 orang, sehingga diperoleh Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,40 %. Capaian yang cukup memuaskan karena sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian ini didukung oleh realisasi Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten grobogan Tahun 2022, meliputi :

#### 1. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA.

Capaian program ini dapat di ukur dengan indicator kinerja program.

**:"Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota,"** yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan di bagi jumlah tenaga kerja/pencari kerja terdaftar dikali seratus.



Tabel 2.23

PENCARI, DITEMPATKAN DAN PERSENTISAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GROBOGAN  
JULAH 30 OKTOBER 2022

Unit: Orang

BULAN	PENCARI			DITEMPATKAN			JENIS PENERBITAN												Jumlah		
	L	P	L+P	L	P	L+P	JAL (Antar Kerja Lokal)			AJAD (Antar Kerja antar Daerah)			AJAM (Antar Kerja Antar Negara)			Jumlah			L	P	L+P
JANUARI	523	791	1.314	425	575	1.000	275	383	658	-	-	-	87	87	174	362	452	814			
FEBRUARI	235	407	642	150	250	400	37	238	275	-	-	-	94	40	134	134	240	374			
MARST	247	487	734	230	350	580	58	233	291	-	-	-	185	45	230	230	326	456			
APRIL	184	308	492	144	286	430	60	178	238	-	-	-	70	55	125	140	233	373			
MET	796	944	1.740	800	1.123	1.923	438	995	1.433	-	-	-	131	78	209	340	1.093	1.633			
JUNE	780	1.185	1.965	523	828	1.351	245	398	643	-	-	-	161	117	278	418	726	1.144			
JULI	894	894	1.788	680	680	1.360	88	481	569	-	-	-	477	344	821	557	648	1.205			
AGUSTUS	314	574	888	330	569	899	62	361	423	-	-	-	142	122	264	294	483	777			
SEPTEMBER	233	462	695	1.481	4.000	5.481	145	340	485	-	-	-	251	158	409	346	480	826			
OKTOBER	222	484	706	300	300	600	66	136	202	-	-	-	112	123	235	177	280	457			
NOPEMBER	281	400	681	300	466	766	58	117	175	-	-	-	152	94	246	314	371	685			
DESEMBER	178	440	618	190	366	556	40	220	260	-	-	-	85	117	202	175	317	492			
Jumlah	4.584	7.230	11.814	5.285	10.723	16.008	1.057	4.430	5.487	-	-	-	1.280	1.178	2.458	1.517	5.585	7.102			

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar sebanyak 11.820 orang dan Jumlah Pencari Kerja ditempatkan sebanyak 9.126 orang, sehingga diperoleh *Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota,* sebesar 77,21 %. Capaian yang cukup memuaskan karena lebih tinggi dari target yang diperjanjikan sebesar 75,75 %.

## 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

Capaian program ini dapat di ukur dengan indicator kinerja program. ***:"Persentase lulusan bersertifikat pelatihan,"*** yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan ketrampilan di bagi jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan dikali seratus.

Tabel 2.24

### DATA JUMLAH LULUSAN PELATIHAN BERSERTIFIKAT PELATIHAN TAHUN 2022

No.	Satuan Kompetensi	Kapasitas	Dilatih	Lulusan
1.	Pembuatan Roti dan Kue	16	16	16
2.	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	16	16	16
3.	Designer Grafts Mode	16	16	16
4.	Tata Kecantikan Kulit	16	16	16
5.	Service Sepeda Motor Injeksi	16	16	16
6.	Pengelola Administrasi Perkantoran	16	16	16
7.	Menjahit Dengan Mesin Lockitch	32	32	32
8.	Practical Office Advance	16	16	16
9.	Perencanaan dan Pemasangan AC untuk Rumah Tangga	16	16	16
10.	Pelatihan Ketrampilan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	375	375	375
11.	Pelatihan CPMI/PMI yang di Laksanakan Oleh BLKUN	3.374	3.374	3.374
Jumlah		3.909	3.909	3.909

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 3.909 orang dan Jumlah Peserta Pelatihan yang Lulus sebanyak 3.909 orang, sehingga diperoleh *Persentase lulusan bersertifikat pelatihan,* sebesar 100 %. Capaian yang cukup memuaskan karena sesuai target yang diperjanjikan sebesar 100 %.

### 3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Capaian program ini dapat di ukur dengan indicator kinerja program. ***:"Pesentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB,"*** yang dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB bagi jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih dikali seratus.

Tabel 2.25

DATA PERUSAHAAN YANG MEMPUYAI PERATURAN PERUSAHAAN (PP)						
TAHUN 2022						
NO	PERUSAHAAN	NOMOR SURAT	NO PENCATATAN	PERIODE MULAI	PERIODE BERAKHIR	KETERANGAN
1	SPBU 44.581.06 GETASREJO	056/181/III/2012	PP 08/2012	16/01/2012	15/03/2013	
2	RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG	065/557.1/IX/2015	PP 18/2015	18/08/2015	17/08/2017	
3	BPR WIROSARI UO	560/IV/IV/2016	PP 36/2016	12/04/2016	11/04/2018	
4	PT PUNGKOOK INDONESIA ONE	560/881/VI/2017	PP 45/2015	03/10/2016	02/10/2018	PERUBAHAN
5	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, Gedong	1214/PHUSK-PK/PP/X/2017	16/PP/P-5/X/2017	21/10/2017	20/10/2019	KEMENTERIAN
6	PT PUNGKOOK INDONESIA ONE	560/1496.6/X/2016	PP 45/2015	03/10/2016	02/10/2018	
7	PT CITRA NIAGA KARYALESTARI	4945/2017	-	15/11/2017	15/10/2019	PROVINSI
8	PT MALINDO FEEDMILL TBK	1543/PHUSK-PK/PP/XI/2017	18/PP/P-3/XI/2017	05/12/2017	04/12/2019	KEMENTERIAN
9	PT. MALINDO HATCHERY	1545/PHUSK-PK/PP/XI/2017	18/PP/P-3/XI/2017	05/12/2017	04/12/2019	KEMENTERIAN
10	BPR PURWA ARTHA	560/588/IV/2018	PP 39/2018	07/04/2018	06/04/2020	
11	CV CENDANA MEGAH SANTOSA	560/589/IV/2018	PP 41/2018	26/03/2018	25/03/2020	
12	RS PERMATA BUNDA	560/134.1/3/2019	PP 11/2019	07/02/2019	06/02/2021	
13	BPR SEMERU	560/277.1/IV/2019	PP 38/2019	18/04/2019	17/04/2021	
14	RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG	560/556/X/2019	PP 18/2019	30/09/2019	29/09/2021	
15	PT BELGINDO RAYA	560/631.11/X/2019	PP 40/2019	21/10/2019	20/10/2021	
16	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, Ngaringan	1875/PHUSK-PK/PP/X/2019	126/PP/P-6/X/2019	19/11/2019	18/11/2021	KEMENTERIAN
17	BPR BKK PURWODADI	560/220.1.VII/2020	PP 46/2020	21/04/2020	20/04/2020	
18	PT BERJIL JAYA SEJAHTERA	560/234.1/VI/2020	PP 47/2020	30/05/2020	29/05/2022	
19	RS ISLAM PURWODADI	560/309.2/IX/2020	PP 48/2020	10/09/2020	09/09/2022	
20	CV INTI KARYA MAKMUR	560/314.1/IX/2020	PP 37/2020	01/08/2020	31/08/2022	
21	PT. BPR. PURWA ARTHA	560/82/III/2021	PP 01/2021	18/02/2021	17/02/2023	
22	PALANG MERAH INDONESIA KAB. GROBOGAN	560/100/III/2021	PP 02/2021	01/02/2021	31/01/2023	
23	RS PERMATA BUNDA	560/134/IV/2021	PP 03/2021	07/02/2021	06/02/2023	
24	BPR SEMERU	560/45.1/V/2021	PP 04/2021	18/04/2021	17/04/2023	
25	BPR BKK PURWODADI	560/293/IX/2021	PP 46/2020	21/04/2020	20/04/2022	PERUBAHAN
26	PT. KARTIKA POLASWATI MAHARDHIKA	560/309/X/2021	PP/05/2021	05/10/2021	04/10/2023	
27	PT PUNGKOOK INDONESIA ONE	560/381.1/XI/2021	PP/06/2021	22/11/2021	21/11/2023	
28	SBPU 44.581.01 PT. BURI BARUWA MARDIKA					Bim Pembaharuan
29	PT. PURI SAKTI SIMI					Bim Pembaharuan
30	PT. BELGINDO RAYA					Bim Pembaharuan
31	PT. ARTHA ANUGRAH ALAM (BIHUN AAA)					Bim Pembaharuan
32	PT. C. CHELDIANG FELD					Bim Pembaharuan
33	PT. MULIA HARVEST AGRITECH					Bim Pembaharuan
34	SPBU 44.581.09 PT. PURI CITRA BAKTI					Bim Pembaharuan
35	PLN UNU PURWODADI					KEMENTERIAN
36	Perum Perhutani BPH Gubuh					Kementerian
37	BRI Cabang Purwodadi					Kementerian
38	Bank Jateng Cabang Purwodadi					Kementerian
39	Bank Mandiri Cabang Purwodadi					Kementerian
40	Bank Woori Saudara Purwodadi					Kementerian
41	CV USAHA BOGA SUKSES MAKMUR	560/9.1/I/2022	PP/01/2022	17/01/2022	16/01/2024	
42	PT LONG ICE SUCCESS INDONESIA	560/9/I/2022	PP/02/2022	17/01/2022	16/01/2024	



Tabel 2.26

## DATA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI TENAGA KERJA LEBIH DARI 10 ORANG

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Kategori Besut/Sedang/Kecil	Jumlah Karyawan
1	PT Pungkuk Indonesia One	JL. RAYA PURWODADI-BLORA KM 18 RT 001 RW 002 KEL. TANJUNGREJO KEC. WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN JAWA TENGAH	Besar	12.420
2	PT Formosa Ilir Indonesia	Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 26,5	Besar	5.457
3	PT Sui Apparel Industries	Jl. Semarang Purwodadi Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58162	Besar	2.145
4	PT Heli Karya Sakti	JALAN RAYA SEMARANG PURWODADI KM 28 TEGOWANU GROBOGAN	Besar	1.632
5	Bri Purwodadi	Jl. KS Tulan No 1 Purwodadi Grobogan	Besar	732
6	BS Permata Bunda Purwodadi	Jl. Hutan Wukir no. 24 Purwodadi Grobogan	Besar	439
7	Rumah Sakit Panti Rahayu "yakkum" Purwodadi Grobogan	Jalan R. Supripto No. 6, Kalurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Besar	409
8	PT Batigado Rayn	Jl. SEMARANG - PURWODADI KM 27 DSN DIPLANG DS MANGUNSARI KEC TEGOWANU KAB GROBOGAN	Besar	358
9	PT BPR BIK PURWODADI (PERSERO)	Jl. SISWAMBARJO NOMOR 40 PURWODADI	Besar	322
10	PERUMDA AIR MINUM PURWA TIRTA PHARMA KAB. GROBOGAN	Jln. Gajahmada no. 5, stugungjima purwodadi grobogan	Besar	287
11	Devia Ramani Jawa Tengah Kph Gadhik	Jl. Jendral Sudirman 72 Gadhik, Grobogan	Besar	286
12	Ran Pda Muhammadiyah Grobag	Jl. R. Supripto No. 12 Krawan, Kec. Grobag, Kab. Grobogan	Besar	277
13	PT Semen Grobogan	Desa Tanggungharjo Kec. Tanggungharjo	Besar	277
14	Rumah Sakit Islam Purwodadi	Jl. Dr. SOETOMO NO. 9 PURWODADI GROBOGAN JAWA TENGAH	Besar	276
15	Kantor Kph Purwodadi	JLN GATOT SUBROTO NO 1 PURWODADI GROBOGAN	Besar	251
16	PT Japfa Comfeed Indonesia Unit Grobogan	JALAN RAYA SEMARANG - PURWODADI KM 49 DESA HARJOWINANGUN KEC GODONG KAB. GROBOGAN	Besar	203
17	Malin Harvest Agrotek	Jl. RAYA PURWODADI - BLORA, MAYAHAN TAWANGHARJO, PURWODADI	Besar	193
18	PT Berli Jaya Sejahtera	Jalan Permata Kria Desa Rajawati	Besar	175
19	PT. World Innovative Telecommunication	J. Ahmad Yani No 149B Kuriptan RT 005 RW 013, Kel. Kuriptan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan	Besar	154
20	PT. Citrajaya Karyaestari	Jl. RAYA PURWODADI BLORA KM 1 DESA JONO KEC. TAWANGHARJO KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH	Besar	155
21	Acta Amara Alun	Jl. LETJEN MT HARYONO NO. 57	Besar	151
22	Karsika Polasyawati Mubardhiha	Jl. A. YANI NO. 89, GUBUG	Besar	150
23	PT Bergrawan Retni Mandiri	Jl. R. Supripto No 53b Purwodadi, Grobogan	Besar	150
24	CV. Selaras Indo Global	Jl. Purwodadi-Solo Km.5 Kraganharjo RT 01/05	Besar	143
25	PT. Indomarco Promoteks Cabang Klaten (Idm Diponegoro 44 - Grobogan)	Jl. Diponegoro No.44, Asem Sawah, Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114	Besar	135
26	CV Jusu Indah	Jalan Siswamharjo No 65 RT 1 RW 15	Besar	124
27	PT Bank Btpn Syariah, Tbk Kfo Purwodadi	J. Ahmad Yani No. 269, Kel. Kuriptan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah	Besar	122
28	PT. Malindo Feedmill, Tbk - Plant Grobogan	Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 40 Desa Harjowinangun	Besar	121
29	Cerhana Merah Satrio	JALAN R SUPRIPTO 181	Besar	114
30	PT Mitra Ekspedisi Sejahtera - Kab. Grobogan (Purwodadi)	Jl. Lingkar Timur Jambatan Kel. Des. Gatenjo, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan	Besar	106
80	PT Yakuti Indonesia Persada Cabang Purwodadi	Jl. Gajahmada No. 49, RT. 006, RW. 001, Kuriptan, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah	Sedang	20
81	PT Basan Auto Finance Purwodadi	Jl. Gajah Mada, RT 06 RW 17 Desa Kuriptan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan - Jawa Tengah	Sedang	20
82	Basa Kcp Purwodadi	JLN SEHADA NO 14 PURWODADI KAB GROBOGAN	Kecil	19
83	PT Donga Webbing Indonesia	Jl. Purwodadi- Blora km. 20 Dusun Sawi RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan	Kecil	18
84	PT. Putra Wahyu Elektrik	Jl. Tentara Pelajar No 45 A Kalongan Purwodadi	Kecil	18
85	Bank Mandiri Kcp Purwodadi	Jl. R. Soeprpto No 97 A-B, Purwodadi Grobogan	Kecil	18
86	Usaha Boga Sukses Makmur	Des. Plosonharjo RT.01 RW.03, Grobogan	Kecil	18
87	PT Bpr Kartasura Seibumi Cabang Godong	Jl. Raya Godong Semarang Km 1 Godong Grobogan	Kecil	18
88	Bank Pembinaan Rakyat Syariah Gula Mitra Abadi	Jl. AHMAD YANI RUKO GRAND MUTIARA NOMOR 1-3	Kecil	16
89	PT Aotra International Tbk-Honda Sales Office Purwodadi	Jl Jendral Soedirman No 51 Kalurahan Purwodadi kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan	Kecil	16
90	PT. Elizabeth Hartjaya - Purwodadi	Jl. R. Supripto 35A Rt 01 Rw 16, Kab. Grobogan	Kecil	16
91	PT Pinus Merah Abadi Cp Purwodadi	Jl. A. YANI RT 02 RW 15 KARANGANYAR PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN	Kecil	14
92	PT Naavagreen Indonesia Cabang Purwodadi	Jl. R. Supripto No. 122 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan	Kecil	14
93	PT Cj Feed And Care Indonesia	Jl Semarang - Purwodadi Km. 32, Kel. Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Kecil	14
94	Puri Cita Indonesia	Jl. Arteri Lingkar Utara	Kecil	13
95	Bank Jajeng Cabang Pembantu Kota Purwodadi	Jl. A YANI NO 285 KURIPAN PURWODADI GROBOGAN	Kecil	12
96	PT. Sarimelati Kencana Tbk (Pizza Hut Letjen Supripto Purwodadi)	Jl. Letjen Supripto No. 78 Grobogan Purwodadi	Kecil	12
97	Ksp Duta Mandiri	Jl. Letjend. R. Supripto No.37 B DSN KRAJAN Godong	Kecil	11
98	PT. Bea Multi Finance Cabang Purwodadi	Jl. A Yani Ngilek Komplek Ruko Grand Mutiara Ruko 6-8 Pusat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Kecil	10
99	Bsi Kcp Purwodadi A Yani	Jl A Yani No 188 Purwodadi	Kecil	10
100	Bank Jajeng Kantor Cabang Pembantu Gubug	Jl. AHMAD YANI NO. 10 GUBUG	Kecil	10
101	Bank Jajeng Cabang Pembantu Pasar Wirosari	Jl. Gajah Mada No.81 B. Grobogan, Jawa Tengah	Kecil	10
TOTAL				26.127

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB sebanyak 42 Perusahaan dan Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih sebanyak 101 Perusahaan, sehingga diperoleh *Pesentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB*, sebesar 41,58 %. Capaian yang cukup memuaskan karena melebihi target yang diperjanjikan sebesar 18,99 %.

#### 4. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Capaian program ini dapat diukur dengan indikator kinerja program. :***"Pesentase Terpenuhinya Kuota Program transmigrasi,"*** yang dihitung berdasarkan jumlah penempatan calon Transmigran dibagi jumlah kuota penempatan Transmigran dikali seratus.

Tabel

DATA PENEMPATAN TRANSMIGRASI ASAL KABUPATEN GROBOGAN					
NO	TAHUN	DAERAH PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
1	2018	1. UPT. Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	7	28	
		2. UPT. Tanjung Satai SP.3 Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	6	37	
2	2019	1. UPT. Tanjung Buka SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	16	70	
		2. UPT. Kahingai Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	9	37	
3	2020				Nihil karena pandemi covid 19
4	2021				Nihil karena pandemi covid 19
5	2022	1. UPT. Motihelumo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	1	4	
		2. UPT. Tanjung Buka SP. 10 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	2	5	
		3. UPT. Kahingai Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	8	29	



Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan ke lokasi Transmigrasi sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 38 Jiwa dan kuota penempatan transmigrans yang telah ditetapkan sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK), sehingga diperoleh *Pesentase Terpenuhinya Kuota Program transmigrasi*, sebesar 100 %. Capaian yang cukup memuaskan karena sesuai target yang diperjanjikan sebesar 100 %.

**b. Capaian Kinerja Tujuan II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

Capaian Kinerja Tujuan II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja Tujuan, Yaitu :

**1. Nilai Sakip Perangkat Daerah.**

Indikator ini merupakan perhitungan nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.

Capaian indikator ini sebesar 73,43 point dengan predikat SANGAT BAIK. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan .

**2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat**

Sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntable, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah menyelenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan public terhadap pelayanan yang diberikan.



Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 370 orang responden, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,98 dengan predikat SANGAT BAIK.

Dari hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa ;

- 1). Kecepatan Layanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,42. Disusul terendah kedua procedure layanan yaitu 3,43.
- 2). Sedangkan dua unsur dengan nilai tertinggi yaitu sarana dan prasarana mendapatkan Nilai tertinggi 3,82 dan biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,81.
- 3). Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 memerlukan upaya yang maksimal agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebesar Rp 11.639.909.442,00,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Grobogan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 11.343.466.335,- (97,45%).

Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogandapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022  
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Grobogan

Tujuan/Sasaran	Indikator Tetapan/Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Tingkat dan Realisasi per Tahun						
			Tingkat		Realisasi		SL/PA	Persentase Capaian (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran
menurunkan Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja	4,40	5.810.954.409	4,40	5.695.955.281	115.358.128	100,45%	98,02%
			48,60	3.526.663.650	25,73	3.436.663.222	83.438.628	48,44%	97,87%
			70,75	1.438.922.859	77,21	1.410.221.899	26.391.000	101,52%	98,17%
			100	99.234.000	100	99.234.000	-	100,00%	100,00%
	Persentase tenaga kerja yang disalurkan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	57	99.234.000	100	99.234.000	-	149,23%	100,00%
			7	84.194.000	7	84.194.000	-	100,00%	100,00%
			23	15.040.000	20	15.040.000	-	100,00%	100,00%
			100	3.520.993.850	100	3.526.663.222	83.438.628	100,00%	97,87%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kaderan/latihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	49	3.818.832.800	100	3.735.221.572	83.438.628	204,06%	97,82%
			501	3.618.652.500	551	3.735.221.572	83.438.628	100,00%	97,82%
			75	101.441.250	0	101.441.250	-	0,00%	100,00%
			50	101.441.250	50	101.441.250	-	100,00%	100,00%

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		75,5	1.337.288.859	77,21	1.310.987.859	26.301.000	102,26%	98,03%
Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota								
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		68	940.470.000	51,87	942.504.590	7.995.500	75,98%	98,16%
Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri								
Pelayanan antar Kerja		11.750	160.265.000	11.820	156.157.500	4.107.500	100,60%	97,44%
Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kabupaten / Kota								
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		60	40.205.000	60	40.225.000	-	100,00%	100,00%
Jumlah Bursa Kerja Khusus / Jumlah siswa yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan								
Perluasan Kesempatan Kerja		780	750.000.000	780	746.142.000	3.858.000	100,00%	98,45%
Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Disnakertrans								
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		2	204.638.909	2	250.003.409	45.375.500	100,00%	83,76%
Jumlah media penyaluran Informasi Pasar Kerja yang terkelola								
Peningkatan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1	114.775.905	1	112.551.403	2.227.500	100,00%	98,06%
Jumlah Aplikasi IPK yang terpelihara								
Job Fair/Bursa Kerja		1	151.860.000	1	137.512.000	14.348.000	100,00%	90,55%
Jumlah Job Fair dan Bursa Kerja yang terlaksana								
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		40	123.179.990	23,34	118.419.950	1.760.000	63,35%	96,54%
Prosentase Calon PMI dan Eks PMI yang dibina								
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)		350	60.175.950	350	60.179.950	-	100,00%	100,00%
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia / Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi								
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		40	40.000.000	40	38.240.000	1.760.000	100,00%	95,60%
Jumlah Pekerja Migran Indonesia/TKI Purna dan Keluarga yang dibantu								



Meningkatkan kondisi lingkungan industri yang induktif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ( PPIPKE, LKS, Bipartis, Struktur Skala Usaha, dan terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan )	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pandaharjan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Pencegahan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Kerjasama Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Peningkatan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Peningkatan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Penyuluhan Transmigrasi	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%
	Pupuhan Transmigrasi	13,99	256.467.392	20,00	294.325.360	247.530	105,32%	100,00%

Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan layanan Publik yang berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SKRP Perangkat Daerah			85	32.844.000	77,43	32.349.000	495.000	112,57%	58,49%
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82,7	5.794.871.033	88,56	5.815.482.354	180.603.379	107,59%	98,88%
	Nilai SKRP Perangkat Daerah			65	32.844.000	77,43	32.349.000	495.000	112,57%	98,49%
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82,7	5.794.871.033	88,56	5.815.482.354	180.603.379	107,59%	98,88%
Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENINOTA			100	2.667.738.291	100	2.637.310.184	130.428.107	100,00%	95,11%
	1. Peningkatan layanan dukungan administrasi kekegiatan yang sesuai SOP			100	32.344.000	100	32.349.000	495.000	100,00%	98,49%
	2. Cakupan Pemenuhan Dokumen Pentalan Manajemen Risiko			100	3.428.332.742	100	3.078.151.379	50.180.372	100,00%	98,49%
	3. Peningkatan Lap. Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik			100	32.344.000	100	32.349.000	495.000	100,00%	98,49%
18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	32.344.000	100	32.349.000	495.000	100,00%	98,49%
	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			74	32.844.000	74	32.349.000	495.000	100,00%	98,49%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3.128.332.742	100	3.078.151.379	50.180.372	100,00%	98,49%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3.128.332.742	100	3.078.151.379	50.180.372	100,00%	98,49%
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14	3.048.287.142	14	2.800.818.379	48.448.372	100,00%	98,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40	80.955.000	40	78.332.500	1.732.500	100,00%	97,84%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	10.999.950	100	9.999.950	50	100,00%	100,00%
	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	10.000.000	2	9.999.950	50	100,00%	100,00%
21	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			68	144.648.700	100	144.388.700	250.000	102,84%	99,87%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat			50	48.750.000	50	46.500.000	250.000	100,00%	98,49%
	22. Kelengkapan			50	48.750.000	50	46.500.000	250.000	100,00%	98,49%
	23. Perundang-undangan			50	96.898.700	50	96.888.700	-	100,00%	100,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		88	1.376.733.150	900,00	1.188.079.430	90.823.799	117,85%	92,90%
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		12	36.848.000	12	36.848.000	-	100,00%	100,00%
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang tersedia		8	200.194.800	8	185.380.900	19.453.800	100,00%	92,20%
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis logistik yang tersedia		1600	129.993.000	1600	126.646.000	-	100,00%	100,00%
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		11	76.306.000	11	76.096.000	-	100,00%	100,00%
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		3	7.800.000	3	7.800.000	-	100,00%	100,00%
29	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia		60	104.260.000	60	145.314.500	19.643.450	100,00%	86,09%
30	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi		12	0,40.001.000	12	503.112.000	51.049.650	100,00%	93,11%
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan yang digunakan dalam pemeliharaan dan maintenance SPBE		12	31.250.000	12	56.755.000	498.000	100,00%	98,42%
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Perangkat Daerah		95	444.482.800	950	406.121.860	38.338.300	117,89%	91,37%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Material 10.000 2. Pengiriman Surat		950	6.500.000	950	6.500.000	-	100,00%	100,00%
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran langganan Listrik, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		12	270.000.000	12	249.761.000	20.238.300	100,00%	92,50%
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Penerimaan dan Baran Penerimaan		25	20.732.000	25	25.192.000	-	100,00%	100,00%
		Jasa Petugas Kebersihan		8	75.960.000	8	58.443.000	17.517.000	100,00%	78,67%
		Jasa Tenaga Keumuhan		3	36.430.000	3	38.325.000	105.000	100,00%	98,73%
		Jasa Tenaga Pengemudi/Sopir		3	30.340.000	3	27.343.000	2.997.000	100,00%	90,49%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang terpelihara		88	791.824.441	160	750.708.464	1.216.037	117,60%	99,48%
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang terpelihara		7	89.510.000	7	89.010.000	-	100,00%	100,00%
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		47	30.710.000	47	30.770.000	-	100,00%	100,00%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		951	275.436.860	951	278.953.754	405.146	100,00%	99,82%
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah (volume) sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		869	352.245.691	869	351.324.700	720.891	100,00%	99,82%
Total					11.539.969.442		11.343.466.336	296.443.107		97,45%



Penyerapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 97,453 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran **Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja**, sebesar 99,92%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sasaran **Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja**, ada efisien realisasi anggaran sebesar 5,40% capaian kinerja sebesar 105,40 % .

Secara khusus Analisis Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29  
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SASARAN I

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja.	1	Persentase tenaga kerja yang diterapkan	%	75,75	77,21	101,83	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.337.268.859	1.310.987.859	98,03
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	49	100	204,08	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.920.080.850	3.926.063.222	97,57
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN I					153,00			5.257.349.709	5.137.051.081	97,95
TINGKAT EFISIENSI 55,85												
TINGKAT EFEKTIFITAS 156,21												

Tingkat Efisiensi pencapaian sasaran I "Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja," sebesar 55,05 artinya bahwa pada tahun 2022 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu mencapai target yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai target yang direncanakan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sedangkan tingkat efektifitas pencapaian sasaran I "Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja," sebesar 156,21, menunjukan tingkat keberhasilan atau pencapaian target yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.30**  
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SASARAN II

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
II	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja	3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10,00	20	100,00	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	296.457.800	296.220.300	99,92
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN II					100,00			296.457.800	296.220.300	99,92
TINGKAT EFISIENSI 5,40											
TINGKAT EFEKTIVITAS 105,40											

Tingkat Efisiensi pencapaian sasaran II "Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja," sebesar 5,40 artinya bahwa pada tahun 2022 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu mencapai target yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai target yang direncanakan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan.

Sedangkan tingkat efektifitas pencapaian sasaran II "Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja," sebesar 105,40, menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian target yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.31**  
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SASARAN III

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
III	Meningkatnya Penempatan Transmigrasi	4 Persentase calon transmigran yang dibenarkan	%	100	100	100,00	1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	157.900.000	152.548.900	96,51
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2									96,51
TINGKAT EFISIENSI 3,39 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 103,51 %											

Tingkat Efisiensi pencapaian sasaran III "Meningkatnya Penempatan Transmigrans," sebesar 3,39 artinya bahwa pada tahun 2022 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu mencapai target yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai target yang direncanakan. Sedangkan tingkat efektifitas pencapaian sasaran III "Meningkatnya Penempatan Transmigrans," sebesar 103,51.



menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian target yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.32

## Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SASARAN IV

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	65	73,43	113,37	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.844.000	32.349.200	98,19
		6	R skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,7	99,99	119,82	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.125.332.742	3.078.161.870	98,52
								3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.999.990	100,00
								4	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	144.645.700	144.395.700	99,89
								5	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	1.279.703.150	1.186.079.400	92,69
								6	Penyediaan Jasa Perangai Urusan Pemerintahan Daerah	444.462.000	405.123.590	91,17
								7	Pewilayahan Barang Milik Daerah Perangai Urusan Pemerintahan Daerah	751.624.440	790.706.400	98,55
								RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN I				
		TINGKAT EFISIENSI 13,39										
		TINGKAT EFEKTIVITAS 119,82										

Tingkat Efisiensi pencapaian sasaran IV "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,," sebesar 13,39 artinya bahwa pada tahun 2022 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu mencapai target yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai target yang direncanakan. Sedangkan tingkat efektifitas pencapaian sasaran IV "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,," sebesar 119,82 menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian target yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu factor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu factor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.



Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Grobogan maka dirumuskan dalam rencana program dan kegiatan yang mengacu pada permasalahan yang ada. Permasalahan atau Isu Strategis Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Isu-Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Masalah yang sedang di hadapi Bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Grobogan khususnya Pasca Pandemi COVID-19 khususnya di bidang Ketenagakerjaan adalah semakin tingginya penganggur terbuka. Tambahan kesempatan kerja baru yang tidak sebanyak tambahan angkatan kerja ( AK ) baru mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah social politik yang semakin meningkat. Hal ini jika dibiarkan akan menghambat proses pembangunan di Kabupaten Grobogan.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja. Yang memprihatinkan pula, jumlah pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain. Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain dengan pelatihan kewirausahaan. Mengurangi pengangguran pada umumnya,

dan pengangguran terdidik pada khususnya, mengingatkan kita pada harapan akan tumbuhnya entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan menitikberatkan pada :

- a. Meningkatkan Penciptaan/Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kompetensi SDM Ketenagakerjaan yang sesuai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
  - b. Penguatan LPK Swasta/Pemerintah, Untuk Meningkatkan Kapabilitas & Kapasitas Daya Tampung Pelatihan, Serta Mendorong Jmlh Pelatihan Yg Terakreditasi.
  - c. Peningkatan Kompetensi Instruktur & Upgrading Sarpras BLK.
2. Isu-Isu Strategis Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantab dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di Perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja Pejabat Fungsional Mediator. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Hubungan Industrial, dengan menitikberatkan pada Peningkatan Perlindungan Naker Melalui Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian

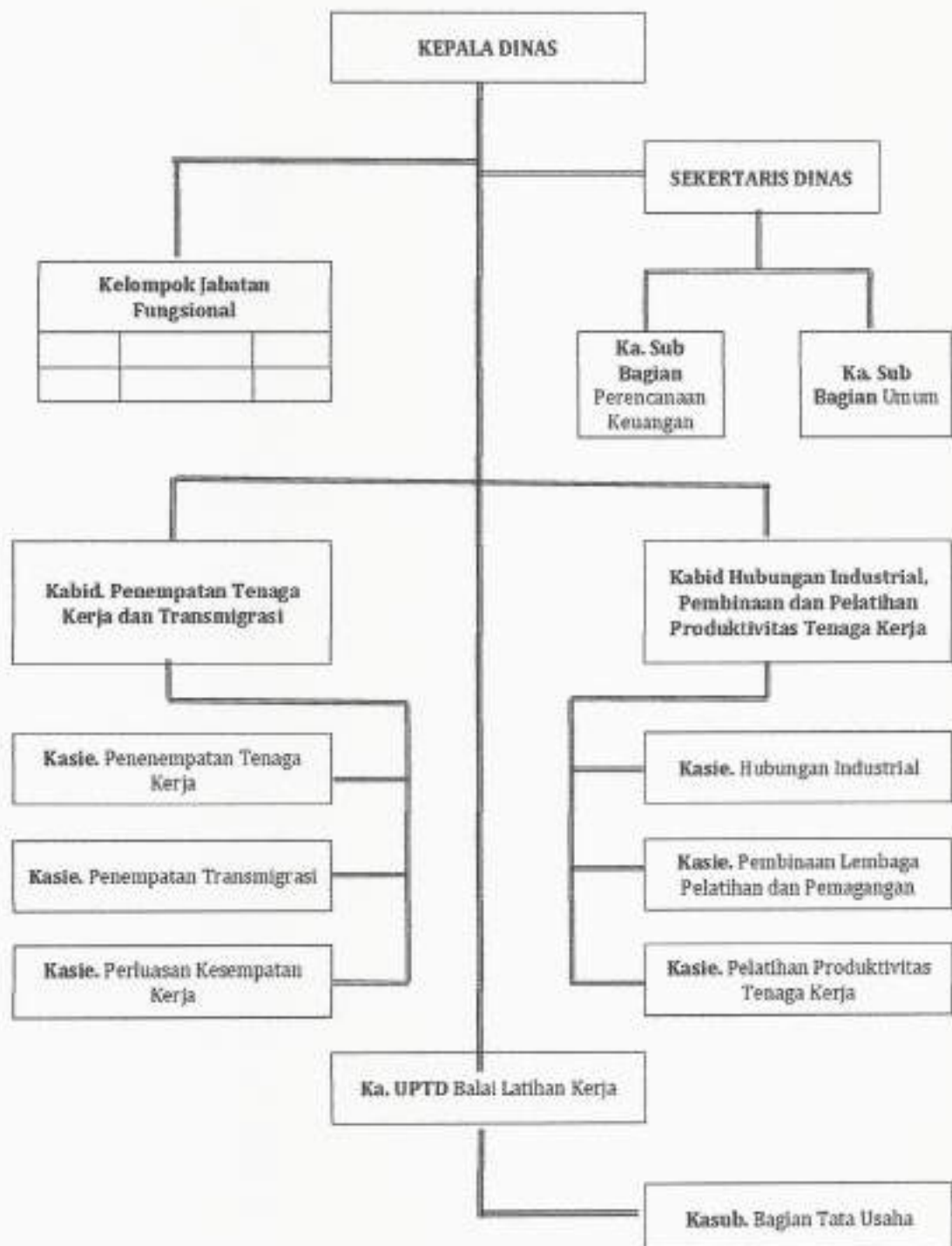
Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara lain:

- a. Lahan yang diberikan kepada transmigran kadang tidak sesuai dengan Kerjasama Antar Daerah yang telah dibuat sehingga menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun



- b. Surat Perintah Pemberangkatan ( SPP ) Transmigrasi dari Pemerintah Pusat biasanya diterbitkan pada akhir tahun anggaran karena menunggu kesiapan daerah penerima yang berakibat akan mengganggu dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang mempunyai batas waktu sesuai dengan ketentuan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN GROBOGAN**



## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan dan setelah mengidentifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD kemudian dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang direncanakan yaitu tahun 2024.

Jumlah Anggaran Rancangan Awal OPD sebanyak Rp. 15.653.946.316,00 yang terdiri dari beberapa program adalah sebagai berikut:

a. **Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 6.782.612.020,00 Program ini dilaksanakan oleh SEKRETARIAT .

b. **Program Perencanaan Tenaga Kerja.**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 109.988.000,00 Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat).

c. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 5.778.611.566,00 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial, Pelatihan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja dan UPT Balai Latihan Kerja.

d. **Program Penempatan Tenaga Kerja.**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 1.887.913.310,00 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

e. **Program Hubungan Industrial.**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 669.940.535,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial, Pelatihan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja.

f. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebanyak Rp. 424.880.885,- Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja.



Tabel 2.33

## Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Disnakertrans Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	-	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pekerjaan : Bimbingan Teknis Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan dan Maner Tim Penyusun RTK Makro								
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	-	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Perusahaan	-	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pekerjaan : Bimbingan Teknis Penyusunan RTK Mikro bagi Perusahaan di Kabupaten Grobogan								

2	07	03	2.01	PROGAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				5.776.611.985,00 5.062.790.364,00	
2	07	03	2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Keasas Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	600 Orang		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.01.02	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Jumlah Kespasialan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	-	Lembaga Pelatihan Kerja 1 Lembaga	3.785.814.633,00 189.980.620,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.01.03	Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal penyediaan instruktur pelatihan tenaga kerja dan pemangangan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	-		
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	10 Unit	1.000.984.614,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	-	60 Lembaga	119.987.670,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.02.02	Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan dan Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	24.998.865,00	
2	07	03	2.03	Penyediaan Sumber Daya Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	-	5 Personel	24.986.865,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.03.01	Pelaksanaan rekomendasi jln lembaga pelatihan kerja Konsultasi/ Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	-	649.848.112,00	
2	07	03	2.04	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-	30 Perusahaan	646.349.112,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.04.01	Pelaksanaan Teknik Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja bagi Perusahaan Kecil Peningkatan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	14.985.585,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	5 Dokumen	14.985.585,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	03	2.06	Pelaksanaan Laporan Produktivitas Inter Tahun 2024	-	-	-		



PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
Penempatan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									
No	Urut	Daerah	Waktu	Detail Kegiatan	Detail Kegiatan	Detail Kegiatan	Detail Kegiatan	Detail Kegiatan	Detail Kegiatan
2	07	04	2.01	2.01.01	Penempatan Sumbat Daya Penerimaan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan pelatihan Melalui Bimbel dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-	4 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.01	2.01.02	Peningkatan kompetensi sumber daya Penerimaan Kerja melalui pengiriman Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
2	07	04	2.01	2.01.03	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AQAD dan AQD	-	3.000 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.01	2.01.04	Pelayanan asistensi dan penempatan pelayanan antar Kerja di MALL PELA YAHAN	-	-	-	-
2	07	04	2.01	2.01.05	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja	Jumlah Penerima Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan	-	3.350 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.01	2.01.06	Pelayanan dan Bimbingan jabatan bagi Siswa SMK melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	18 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.01	2.01.07	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja Penyandang Disabilitas melalui ULD Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Penempatan Kerja	-	300 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.01	2.01.08	Penempatan dan Bimbingan jabatan bagi Tenaga Kerja Mandiri berbasis sumber daya lokal	-	-	-	-
2	07	04	2.02	2.02.01	Penempatan Informal Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informal Pasar Kerja Online	-	1.000 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.02	2.02.02	Penempatan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja	Jumlah Penerima Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kartu HUB)	-	12.350 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.02	2.02.03	Penempatan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja	Jumlah Penerima Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Job Pembinaan Kerja	-	2.000 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	04	2.02	2.02.04	Penempatan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja	Jumlah Penerima Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Job Pembinaan Kerja	-	2.000 Orang	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)

2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pria dan Perempuan) di Daerah Kabupaten/Kota					264.372.650,00	
2	07	04	2.04.01	Pelindungan Pelindungan dan Karpenteran Cipta Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Cipta yang Diundang dan Diangkatnya Kompetensinya	-	-	-	-	60.980.500,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Sosialisasi Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia						
2	07	04	2.04.02	Pelindungan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	-	-	-	-	60.982.480,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Jumlah Cipta yang Tertaruni sesuai Prosedur dalam LTR dan PMI Bersama yang Diangkat						
				Pekerjaan : Pelayanan Persewaan Pekerja Migran Indonesia						
2	07	04	2.04.03	Pembinaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	-	-	-	64.692.700,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan						
				Pekerjaan : Pelatihan Kewirausahaan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						
2	07	04	2.04	Pemeriksaan Perencanaan (MTR) yang Lokal Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	6,00	
2	07	04	2.04.01	Koordinasi dan Bimbingan Perencanaan (MTR) yang Lokal Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
2	07	05	2.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					659.840.535,00	
2	07	05	2.05	Pengembangan Peraturan Perusahaan dan Pendukungnya	-	-	-	-	730.970.850,00	
2	07	05	2.05.01	Pengembangan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-	-	-	46.987.750,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengawasan Peraturan Perusahaan yang Terikat dengan Hubungan Industrial dan Terselenggara di WAKP Online						
				Pekerjaan : Fasilitas dan pendampingan dalam penyusunan peraturan perusahaan (Pasal 108 dan Pasal 112 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)						
2	07	05	2.05.02	Pendampingan Peraturan Kerja Sama bagi Perusahaan	-	-	-	-	14.985.555,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Kerja Sama						
				Pekerjaan : Fasilitas dan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kerja Sama						
2	07	05	2.05.03	Peningkatan Peraturan Perusahaan dan Bimbingan	-	-	-	-	74.995.555,00	PENDAPTA TAN ASLI DAERAH (PAD)
				Jumlah Data dan Informasi Bersama (H/P/PP/KD, Struktur Skala Ujian, dan LK2 Beperta) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamistik serta Pengupahan						
				Pekerjaan : Penyusunan Data Base Sarana Hubungan Industrial Tahun 2024						



2	07	05	3.02	Pembinaan dan Penguasaan Keterampilan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	022.900.05.00	
2	07	05	2.02	Pencapaian Pemertan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berbasis/berorientasi pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		
				Jumlah Pemertan yang Ditengah	2 Perkira	
				- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		142.983.190.00
						PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
2	07	05	2.02	Pembinaan dan pendampingan penyelesaian hubungan industrial serta penyelesaian biaya operasional Daerah Pengusaha		
				Pembinaan dan pendampingan Vertikal dan Horizontal Keterampilan Pengusaha, Federasi dan Kontesional Serikat Pekerja/serikat Buruh serta Non Adhisi	28 Asisten dan 28 Asisten Pekerja	99.990.000.00
				Jumlah Asisten Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Dikerjakan		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Penguatan Vertikal dan Horizontal Keterampilan pada Organisasi Pengusaha, Pekerja dan Kontesional Serikat Pekerja/serikat Buruh serta Non Adhisi		
2	07	05	2.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	189.990.920.00
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Penguatan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Pelaksanaan Kegiatan May Day dan		
2	07	05	2.02	Pengembangan Pelaksanaan Jaringan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Orang	79.800.046.00
				Terdapatnya program jaminan sosial tenaga kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Sosialisasi Program BPJS guna mendorong perusahaan meningkatkan jumlah kepesertaan karyawan pada Program BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan		
2	07	04	2.01	PROJEKSI PERKEMBANGAN UTAMA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		8.762.652.920.00
2	07	04	2.01	Pemerintahan, Penguatan, dan Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah		30.915.800.00
2	07	04	2.01	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	76 Dokumen	39.815.800.00
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Penguatan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana, RENCANA, dan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD.		
2	07	04	2.01	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		2.796.766.000.00
2	07	04	2.01	Pengembangan dan Penguatan ASN		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.990.000.000.00
				- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Penguatan Gaji dan Tunjangan ASN secara 1 Tahun		
2	07	04	2.01	Koordinasi dan Penguatan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJMD	12 Laporan	69.766.000.00
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJMD dan Laporan Hasil Koordinasi Penguatan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJMD		PENDAPAT TAN ASIL DAERAH (PAD)
				Pembinaan : Penguatan dan penguatan laporan keuangan akhir tahun dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		

2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						24.800.000,00	
2	07	01	2.03.06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
				Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Grobogan, Samudra	-	12 Laporan	-	24.800.000,00	PENDAPPA TAN ASU DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Perencanaan barang milik daerah yang berada di perangkat daerah serta penyelenggaraan alokasi opname barang selama 2 kali							
2	07	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						38.137.300,00	
2	07	01	2.04.03	Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah							
				Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	Kab. Grobogan, Samudra	-	1 Laporan	-	38.137.300,00	PENDAPPA TAN ASU DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengurusan Tenaga Kerja ASING							
2	07	01	2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah						298.872.300,00	
2	07	01	2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Alat dan Kelengkapannya							
				Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alat dan Kelengkapan	-	Kab. Grobogan, Samudra	-	65 Paket	-	48.340.000,00	PENDAPPA TAN ASU DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Pengadaan Pakan Dinas beserta Alat dan Kelengkapannya bagi Pegawai							
2	07	01	2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Grobogan, Samudra	-	6 Orang	-	124.736.250,00	PENDAPPA TAN ASU DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan ASN ke Lembaga Pelatihan							
2	07	01	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Grobogan, Samudra	-	90 Orang	-	124.736.250,00	PENDAPPA TAN ASU DAERAH (PAD)
				Pekerjaan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Pegawai							



Kendaraan Umum Perantara Daerah									
2	07	01	2.06	01	2.06	01			1.442.278.735,00
2	07	01	2.06	01	2.06	01	Persediaan Komponen Instalasi		
							Jumlah Paket Konsumsi Instalasi	-	49.254.500,00
							Las/Pemertanian Bengunan	-	
							Kantor yang Disediakan	-	
							Pekerjaan : Pengadaan komponen instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	-	
2	07	01	2.06	02	2.06	02	Persediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	-	
							Jumlah Paket Perawatan dan	-	15 Paket
							Peningkatan Kantor yang	-	
							Disediakan	-	
							Pekerjaan : Peningkatan Perawatan dan Peningkatan Kantor	-	
2	07	01	2.06	04	2.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	-	
							Jumlah Paket Bahan Logistik	-	1850 Paket
							Kantor yang Disediakan	-	
							Pekerjaan : Pengadaan Bahan dan Logistik Kantor	-	119.836.055,00
							Pengawal satelit untuk kapal	-	
2	07	01	2.06	05	2.06	05	Persediaan Barang Cetak dan Pengadaan	-	
							Jumlah Paket Barang Cetak	-	15 Paket
							dan Pengadaan yang	-	
							Disediakan	-	
							Pekerjaan : Cetak Jelas	-	
2	07	01	2.06	06	2.06	06	Persediaan Bahan Baku dan Peralatan	-	
							Jumlah Dokumen Bahan Baku	-	3 Dokumen
							dan Peralatan Peralatan	-	
							Udangan yang Disediakan	-	
							Pekerjaan : Pengadaan / Pengadaan Surat Kabar Lokal dan Nasional	-	
2	07	01	2.06	07	2.06	07	Persediaan Bahan Material	-	
							Jumlah Paket Bahan Material	-	50 Paket
							yang Disediakan	-	
							Pekerjaan : Pengadaan alat tulis kantor	-	
2	07	01	2.06	08	2.06	08	Persediaan Laporan Raport Koordinasi dan Konsultasi	-	
							Jumlah Laporan Penyusunan	-	12 Laporan
							Raport Koordinasi dan Konsultasi	-	
							SKPD	-	
							Pekerjaan : Pengadaan biaya pelayanan Dinas Bina dan Moncong serta	-	
							Pengiriman Transmigrasi	-	
2	07	01	2.06	11	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	
							Jumlah Dokumen Dukungan	-	12 Dokumen
							Pelaksanaan Sistem	-	
							Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	
							SKPD	-	
							Pekerjaan : Pengadaan biaya / pembelian layanan pada website dan media	-	50.984.430,00
							social	-	

2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486.871.196,00	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surti Menyurat						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surti Menyurat	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	8.690.000,00
					Pekerjaan : Penyediaan Benda Pua, Material dan Pranku						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	209.036.330,00
					Pekerjaan : Cakupan Jasa						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Laporan	-	169.094.819,00
					Pekerjaan : Penyediaan jasa pelayanan kesehatan, keamanan, dan air serta bahan pembersih dan alat kebersihan						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08		Pemeliharaan Bangun Muka Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.937.490,00
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemaraan Dinas Jabatan						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerti dan Dibayar Pakainya	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	20 Unit	-	148.093.500,00
					Pekerjaan : pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	45 Unit	-	69.046.480,00
					Pekerjaan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Unit	-	194.084.205,00
					Pekerjaan : Penyediaan biaya Pemeliharaan rutin gedung kantor, penggantian dan perbaikan perbaikan yang tak terduga						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)
2	07	01	2.08	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	-	Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Unit	-	194.084.205,00
					Pekerjaan : Pemeliharaan/Rehabilitasi ALU/BU/DA Dinas Tersebut Kota dan Transmigrasi						PENDAPAT TAN ASU DAERAH (PAD)





Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, yaitu untuk menjaring kegiatan aspirasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, maupun hasil pengumpulan informasi sendiri terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun 2024

Adapun hasil telah dari program dan kegiatan belanja langsung tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.34**  
**Usulan Program / Kegiatan dari Masyarakat**  
**Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI / DINAS</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1.	DPRD	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Balai Keterampilan kerja Logam dan Non Logam Kelompok Omah Siap Kerja Tegowanu Kulon RT 1 RW 02 Kec. Tegowanu	PAD



# **TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

## **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.**

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

### **1. Kementerian Ketenagakerjaan**

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional. Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

#### **1). Visi**

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 tersebut yaitu:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

## **2) Tujuan**

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

- a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;

kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;

- g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

## 2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020- 2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan Antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.



tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity ( TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen persen dari modal manusia. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakemas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel, diperlukan tenaga kerja yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governmental ) yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

### 3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing".

Perdesaan adalah wilayah desa-desa atau kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif dan bermanfaat dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.

Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di aras regional maupun internasional.

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 70 perdesaan;
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi;
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan;
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Mandiri;
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan;



sistem pengembangan;

5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul;
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Bila di kaitkan dengan Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya". Guna mencapai Visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi Bupati Grobogan tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
2. Membangun Insfrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata berkualitas dan berdaya saing.
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Memperkuat Implementasi nilai-nilai keimanan & budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dari pernyataan misi tersebut, misi yang pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Misi III dan IV yaitu "Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata berkualitas dan berdaya saing" dan "Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik".

Misi ini berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, hubungan industrial dan jaminan social, serta ketransmigrasian.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sesuai **Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** adalah program-program :



- b. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Hubungan Industrial;
- e. Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan berupaya mendukung Misi ke 3 Pembangunan Kabupaten Grobogan yaitu **“Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.”** serta focus pada prioritas **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Penanaman Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya.”**

Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut maka **Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja** sesuai tugas dan tupoksinya, Yaitu

1. **Menurunkan Tingkat Pengangguran,**
2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

Untuk mencapai tujuan tersebut melalui Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

#### ➤ **VISI**

**Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah**

#### ➤ **MISI**

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan terlindungi jaminan sosial.
3. Meningkatkan fasilitas pelayanan penempatan calon Taransmigrans yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja adalah **Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,**

**Terbuka. Target Tingkat Pengangguran Terbuka** yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 4.2 %.

Guna mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah, maka perlu ditentukan sasaran beserta indikator yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, Indikator Sasaran dan target yang akan dicapai tahun 2024 yang merupakan Indeks Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya keterampilan, kompetensi dan penempatan tenaga kerja.

*Indikator Sasaran Strategis 1 : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi ( sebesar 49,25% ) dan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan ( sebesar 75,80 % ).*

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja.

*Indikator Sasaran Strategis 2 : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. ( sebesar 23,21% )*

- Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemberangkatan dan penempatan transmigrans yang berkualitas.

*Indikator Sasaran Strategis 3: Persentase Calon Transmigrans yang diberangkatkan. ( sebesar 100% )*

- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

*Indikator Sasaran Strategis 4 : Nilai SAKIP OPD ( BB / 71 ) dan Nilai IKM OPD ( B / 83,29).*

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2024	PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2024	PRIORITAS DISNAKERTRANS TAHUN 2024
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	3. pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya.	2. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah.	2. Peningkatan Produktifitas tenaga kerja di perusahaan dan meningkatkan kondusifitas Hubungan Industrial demi Kesejahteraan Rakyat
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.		3. Peningkatan Kualitas Calon Transmigrans melalui pelatihan ketrampilan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	3. pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya.	3. Penguatan Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Infrastruktur Penunjang Perekonomian.	
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim			
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2. pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah berdaya saing	1. Penguatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	1. Peningkatan Kompetensi dan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan Canaker dan Instruktur serta pemagangan canaker sesuai DUDI.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			
7. memperkuat polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal.	4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Responsif, Profesional dan Modern.	4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

### 3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Perangkat Daerah, dengan lokasi kegiatan pada daerah – daerah kantong kemiskinan. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan 20 (dua puluh) kegiatan serta jumlah sub kegiatan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.



**a. Program**

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**b. Kegiatan**

1. Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan;
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan;
5. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
6. Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
7. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan;
8. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
9. Pelindungan PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
10. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan
11. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan;
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan;

(satu) Sub kegiatan;

15. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan;
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 (tiga) Sub Kegiatan;
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan;
20. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan;

Kegiatan – kegiatan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat lokasinya diprioritaskan pada daerah kantong – kantong kemiskinan, sedangkan kegiatan -kegiatan yang lain menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan sesuai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

[illegible]



[illegible]





[illegible]



2 07 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.443.219.735,00			
2 07 01 2.06 01				Penyediaan Komponen Instalasi							
2 07 01 2.06 02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
2 07 01 2.06 04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
2 07 01 2.06 06				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
2 07 01 2.06 06				Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan							
2 07 01 2.06 07				Penyediaan Bahan/Material							
2 07 01 2.06 08				Penyediaan alat tulis kantor							
2 07 01 2.06 11				Dukungan Pelaksanaan dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

2	07	01	2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			438.971.195,00
2	07	01	2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	8.990.000,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	
				Pekerjaan : Penyediaan Benda Pos, Material dan Praktek,			
2	07	01	2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	200.988.380,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Daedilakan	-	12 Laporan	
				Pekerjaan : Gakup Jasa			
2	07	01	2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	189.984.815,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Daedilakan	-	12 Laporan	
				Pekerjaan : Pengadaan jasa pembersihan, komanan, dan aspir serta bahan pembersih dan alat kebersihan			
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			639.967.490,00
2	07	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	149.983.500,00
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	20 Unit	
				Pekerjaan : pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan,			
2	07	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	99.995.480,00
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	45 Unit	
				Pekerjaan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			
2	07	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	194.984.265,00
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi	-	3 Unit	
				Pekerjaan : Penyediaan biaya Pemeliharaan rutin gedung kantor, pengcatan dan perbaikan perbaikan yang tak terduga			
2	07	01	2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	194.984.265,00
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi	-	1 Unit	
				Pekerjaan : Pemeliharaan/Rehabilitasi MUSTOLA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

3	32						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				424.880.885,00
3	32						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				424.880.885,00
3	32	03					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				424.880.885,00
3	32	03	2.01				Pertanian Persebaran Penduduk yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				424.880.885,00
3	32	03	2.01	04			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-	-	20 Kepala Keluarga	
							Pekerjaan : Pelaksanaan pemberangkatan calon transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi transmigrasi				
3	32	03	2.01	05			Penyuluhan Transmigrasi				84.936.060,00
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	-	240 Kepala Keluarga	
							Pekerjaan : Sosialisasi Program BPJS guna mendorong perusahaan Pelatihan Transmigrasi				
3	32	03	2.01	06							69.972.735,00
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-	-	40 Orang	
							Pekerjaan : Pelaksanaan sosialisasi dan promosi program transmigrasi kepada masyarakat				
3	32	03	2.01	08			Penempatan ke Lokasi Lokal Penempatan Transmigran				59.977.500,00
							Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penempatan	-	-	2 Lokasi	
							Pekerjaan : Melaksanakan penempatan ke calon Lokasi penempatan Transmigrasi untuk memperoleh informasi calon lokasi penempatan				
3	32	03	2.01	18			Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				69.999.940,00
							Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Pendampingan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	-	-	20 KK	
							Pekerjaan : Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				
3	32	03	2.01	20			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	-	2 Lokasi	69.996.000,00
							Pekerjaan : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Transmigran Asal Kabupaten Grobogan Tahun 2018				



### 3.4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan di tempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah :

**a. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja :**

Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, melalui Pelatihan Kertrampilan berbasis kebutuhan masyarakat ( PBM ); Pelatihan Kewirausahaan; Pelatihan Pengembangan Kualitas Ketenagakerjaan dan Pendidikan Pelatihan bagi Pencari Kerja serta Pembinaan dan pelatihan kapasitas tenaga kerja produktif.

**b. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan di Balai Latihan Kerja ( BLK );** melalui perbaikan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang pelatihan ketrampilan.

**c. Peningkatan penempatan Tenaga Kerja :**

Peningkatan pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Grobogan, Mengoptimalkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Pra dan Purna penempatan serta pembebasan biaya pelatihan untuk Calon PMI yang memenuhi ketentuan; serta meningkatkan pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

**d. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis**

Meningkatkan pencegahan perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan fasilitas dan dukungan pelaksanaan operasional Lembaga Kerja Sama ( LKS ) di daerah.

**e. Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran**

Sosialisasi transmigrasi ke desa-desa dan fasilitasi calon transmigran yang akan diberangkatkan ke lokasi daerah tranmigrasi.

**f. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang responsive, professional dan modern.**

Penguatan Layanan Ketenagakerjaan di MALL PELAYANAN Kabupaten Grobogan, Penguatan Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024**

## **4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan 20 (duapuluh) kegiatan serta jumlah sub kegiatan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

Adapun lebih terperinci dapat disajikan sebagai berikut :

### **A. Program**

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA.
3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.
4. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA.
5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI.
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### **B. KEGIATAN**

1. Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan;
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Pebinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan;
5. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
6. Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
7. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan;
8. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
9. Pelindungan PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
10. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;

- Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan;
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan;
14. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan;
15. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan;
16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan;
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan;
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 (tiga) Sub Kegiatan;
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan;
20. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan;

#### 4.2. Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Proyeksi total surplus/deficit OPD Tahun 2024	: Rp	15.368.746.316, 00
a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2024	: Rp	285.600.000, 00
b. Proyeksi Belanja Tahun 2024	: Rp	15.653.946.316, 00
c. Proyeksi Pebiayaan Tahun 2024	: Rp	0, 00

Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp. 285.600.000,00 yang dihitung berdasarkan data Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Grobogan sebanyak 17 orang.



## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan Visi Disnakertrans Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rancangan Awal Renja 2024. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal.

Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi. Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan.

Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya Visi Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 2023

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN GROBOGAN

  
Drs. TEGUH HARJO KUSUMO, R. M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720102 199101 1 001